BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada laporan ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif. Sugiyono (2016: 7) mendefinisikan bahwa:

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari hasil kuesioner yang dibagikan. Waktu penelitian dilaksanakan secara bertahap mulai dari bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018.

3.3 Identifikasi Variabel

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Variabel Dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Menurut Sugiyono (2016), "Variabel Terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas". Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel Independen sering disebut juga sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Variabel Independen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Menurut Sugiyono (2016), "Variabel Bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)". Variabel Independen dalam penelitian ini

adalah Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) , Pengendalian Akuntansi (X_2) dan Sistem Pelaporan (X_3) .

Berikut ditampilkan tabel operasional variabel independen dan variabel dependen:

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabal	Dimonsi	Indikator	Clzolo	No.
v arraber	Dimensi	Illulkatoi	Skala	Kuesioner
DEPENDEN (Y) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawab kan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.	Dimensi Akuntabilitas Kinerja	 Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum Akuntabilitas Proses Akuntabilitas Program Akuntabilitas Kebijakan 	Skala	

INDEPENDEN (X)				
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₁) Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. (Suhartono dan Solichin, 2006)	Sasaran Anggaran	 Jelas Spesifik Mengerti (Kenis dalam Kurnia, 2004) 	Likert	1, 5, 8, 12, 9 2, 6, 11 3, 4, 7, 10
Pengendalian Akuntansi (X ₂) Pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuranukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. (Bastian, 2006: 450)	Prosedur pengendalian akuntansi	 Kebijakan dan Peraturan Terpenuhi Aktiva dan Catatan Organisasi Tidak Disalahgunakan Keandalan Informasi Keuangan (Bastian, 2007) 	Likert	13, 14, 16, 17, 18, 22 15, 19, 20 21
Sistem Pelaporan (X ₃) Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian	Informasi	 Menentukan Tingkat Kepatuhan Evaluasi Tingkat Efisiensi dan Efektifitas 	Likert	23, 24, 28 26, 27

TOTAL		
(Abdullah, 2005)		
ditetapkan.		
anggaran yang telah		
mengimplementasikan	(Anjarwati, 2012)	
manajerial dalam	_	
mengendalikan kinerja	Keuangan	
memantau dan	Laporan	
diperlukan agar dapat	Penyajian	
pelaporan yang baik	Kelengkapan	25
anggaran). Sistem		

Sumber: Data yang diolah (2018)

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016: 80), "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi dalam penelitian ini adalah 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari 10 Badan, 26 Dinas, 2 Sekretariat, Inspektorat, Rumah Sakit dan Satuan di Provinsi Sumatera Selatan.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016: 81), "Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik pengumpulan data secara sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. (Sugiyono, 2016: 85). Hal ini berarti sampel yang digunakan adalah 41 OPD Provinsi Sumatera Selatan dengan unit analisis untuk masing-masing OPD terdiri dari 3 orang responden yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaporan anggaran yang terdiri dari 1 kepala subbagian program/perencanaan, 1 kepala subbagian keuangan dan 1 staf keuangan. Berikut adalah daftar organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 3.2 Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3 2. Badan Pendapatan Daerah 3 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3 4. Badan Kepegawaian Daerah 3 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 3 6. Badan Pengembangan Bencana Daerah 3 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 8. Badan Penghubung 3 9. Badan Penghubung 3 10. Dinas Pendidikan 3 11. Dinas Pendidikan 3 12. Dinas Pu Bina Marga dan Tata Ruang 3 13. Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air 3 14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 15. Dinas Sosial 3 16. Dinas Kerja dan Transmigrasi 3 17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 18. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 3 19. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3 21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3	No.	Nama Instansi	Responden
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Kepegawaian Daerah 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Badan Penghubung 3. Dinas Pendidikan 3. Dinas Pendidikan 3. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang 3. Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Dinas Komunikasi dan Informasi 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Dinas Pemuda dan Olahraga	1.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3
4.Badan Kepegawaian Daerah35.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah36.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah37.Badan Penanggulangan Bencana Daerah38.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik39.Badan Penghubung310.Dinas Pendidikan311.Dinas Pendidikan312.Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang313.Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air314.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman315.Dinas Sosial316.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi317.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak318.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan319.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan320.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil321.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa322.Dinas Perhubungan323.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah325.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu326.Dinas Pemuda dan Olahraga3	2.	Badan Pendapatan Daerah	3
5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah36.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah37.Badan Penanggulangan Bencana Daerah38.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik39.Badan Penghubung310.Dinas Pendidikan311.Dinas Resehatan312.Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang313.Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air314.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman315.Dinas Sosial316.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi317.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak318.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan319.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil320.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil321.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa322.Dinas Perhubungan323.Dinas Komunikasi dan Informasi324.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah325.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu326.Dinas Pemuda dan Olahraga3	3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Radan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Badan Penghubung 3. Dinas Pendidikan 3. Dinas Pendidikan 3. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang 3. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang 3. Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Sosial 4. Dinas Sosial 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Dinas Perhubungan 5. Dinas Komunikasi dan Informasi 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Dinas Penuda dan Olahraga 5. Dinas Pemuda dan Olahraga	4.	Badan Kepegawaian Daerah	3
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah38.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik39.Badan Penghubung310.Dinas Pendidikan311.Dinas Kesehatan312.Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang313.Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air314.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman315.Dinas Sosial316.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi317.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak318.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan319.Dinas Ketahanan Hidup dan Pertanahan320.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil321.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa322.Dinas Perhubungan323.Dinas Komunikasi dan Informasi324.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah325.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu326.Dinas Pemuda dan Olahraga3	5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 9. Badan Penghubung 3 10. Dinas Pendidikan 3 11. Dinas Kesehatan 3 12. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang 3 13. Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air 3 14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 15. Dinas Sosial 3 16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 18. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 3 19. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 3 20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3 21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 22. Dinas Perhubungan 3 23. Dinas Komunikasi dan Informasi 3 24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3 25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 26. Dinas Pemuda dan Olahraga 3	6.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3
9. Badan Penghubung 3 10. Dinas Pendidikan 3 11. Dinas Kesehatan 3 12. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang 3 13. Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air 3 14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 15. Dinas Sosial 3 16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 18. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 3 19. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 3 20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3 21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 22. Dinas Perhubungan 3 23. Dinas Komunikasi dan Informasi 3 24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3 25. Dinas Pemuda dan Olahraga 3 26. Dinas Pemuda dan Olahraga 3	7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
10.Dinas Pendidikan311.Dinas Kesehatan312.Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang313.Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air314.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman315.Dinas Sosial316.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi317.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak318.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan319.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan320.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil321.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa322.Dinas Perhubungan323.Dinas Komunikasi dan Informasi324.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah325.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu326.Dinas Pemuda dan Olahraga3	8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3
11.Dinas Kesehatan312.Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang313.Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air314.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman315.Dinas Sosial316.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi317.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak318.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan319.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan320.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil321.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa322.Dinas Perhubungan323.Dinas Komunikasi dan Informasi324.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah325.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu326.Dinas Pemuda dan Olahraga3	9.	Badan Penghubung	3
12. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang 13. Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air 14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 15. Dinas Sosial 16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 18. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 19. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22. Dinas Perhubungan 3 22. Dinas Komunikasi dan Informasi 24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25. Dinas Pemuda dan Olahraga 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	10.	Dinas Pendidikan	3
13.Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air314.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman315.Dinas Sosial316.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi317.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak318.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan319.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan320.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil321.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa322.Dinas Perhubungan323.Dinas Komunikasi dan Informasi324.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah325.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu326.Dinas Pemuda dan Olahraga3	11.	Dinas Kesehatan	3
14.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman315.Dinas Sosial316.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi317.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak318.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan319.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan320.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil321.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa322.Dinas Perhubungan323.Dinas Komunikasi dan Informasi324.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah325.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu326.Dinas Pemuda dan Olahraga3	12.	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	3
15. Dinas Sosial 16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 18. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 19. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22. Dinas Perhubungan 23. Dinas Komunikasi dan Informasi 24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 26. Dinas Pemuda dan Olahraga 3	13.	Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air	3
16.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi317.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak318.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan319.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan320.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil321.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa322.Dinas Perhubungan323.Dinas Komunikasi dan Informasi324.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah325.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu326.Dinas Pemuda dan Olahraga3	14.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3
17.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak318.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan319.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan320.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil321.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa322.Dinas Perhubungan323.Dinas Komunikasi dan Informasi324.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah325.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu326.Dinas Pemuda dan Olahraga3	15.	Dinas Sosial	3
18.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan319.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan320.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil321.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa322.Dinas Perhubungan323.Dinas Komunikasi dan Informasi324.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah325.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu326.Dinas Pemuda dan Olahraga3	16.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3
19. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22. Dinas Perhubungan 3 23. Dinas Komunikasi dan Informasi 3 24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 26. Dinas Pemuda dan Olahraga 3	17.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3
20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3 21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 22. Dinas Perhubungan 3 23. Dinas Komunikasi dan Informasi 3 24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3 25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 26. Dinas Pemuda dan Olahraga 3	18.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	3
21.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa322.Dinas Perhubungan323.Dinas Komunikasi dan Informasi324.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah325.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu326.Dinas Pemuda dan Olahraga3	19.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	3
22.Dinas Perhubungan323.Dinas Komunikasi dan Informasi324.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah325.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu326.Dinas Pemuda dan Olahraga3	20.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3
23.Dinas Komunikasi dan Informasi324.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah325.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu326.Dinas Pemuda dan Olahraga3	21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
24.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah325.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu326.Dinas Pemuda dan Olahraga3	22.	Dinas Perhubungan	3
 25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 26. Dinas Pemuda dan Olahraga 3 	23.	Dinas Komunikasi dan Informasi	3
26. Dinas Pemuda dan Olahraga 3	24.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3
6	25.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
27. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3	26.	Dinas Pemuda dan Olahraga	3
	27.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3

28.	Dinas Perpustakaan	3
29.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	3
30.	Dinas Perkebunan	3
31.	Dinas Kehutanan	3
32.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3
33.	Dinas Perdagangan	3
34.	Dinas Perindustrian	3
35.	Dinas Kearsipan	3
36.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3
37.	Inspektorat	3
38.	Rumah Sakit Dr. Ernaldi Bahar	3
39.	Satuan Polisi Pamong Praja	3
40.	Sekretariat DPRD	3
41.	Sekretariat Daerah	3
	TOTAL	123

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel 2018

Dalam penyusunan laporan ini, peneliti menggunakan skala *Likert* sebagai salah satu skala pengukuran pendapat responden pada penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016: 93), "Skala *Likert* merupakan suatu pengukuran dengan menggunakan skala interval. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial."

Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel dependen dan variabel independen yaitu lima tingkatan. Pernyataan positif alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) diberikan skor 5 dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1, perinciannya adalah sebagai berikut:

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 3 = Netral(N)

Skor 4 = Setuju(S)

Skor 5 =Sangat Setuju (SS)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Metode Survei

Menurut Sugiyono (2016: 137) terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan pengumpulan data:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data berdasarkan pada laporan diri sendiri (self report) atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media seperti telepon).

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tulisan kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data efesien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang diukur dan tahu yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan untuk jika jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan dan pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

c. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka obeservasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyekobyek alam yang lain.

Penyusunan Skripsi ini membutuhkan data yang yang akurat, objektif serta mendukung untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga pada pembuatan Skripsi ini peneliti menggunakan metode survei kuesioner (angket).

3.5.2 Metode Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (*textbook*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar,

artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam menyusun Skripsi ini selain menggunakan metode kuesioner, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan.

3.6 Uji Persyaratan Instrumen

3.6.1 Uji Validitas Instrumen

Menurut Sugiyono (2012:255), "Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur". Pengujian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total dengan menggunakan corrected item-total correlation dengan analisis reliability. Menurut Priyatno (2012), untuk menentukan suatu item layak digunakan atau tidak, maka batas nilai minimal korelasi 0,30 bisa digunakan. Semua item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya pembedanya dianggap memuaskan (Priyatno, 2012; Azwar, 1999). Jadi item yang memiliki nilai koefisien korelasi di bawah 0,30 dianggap tidak valid. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Windows versi 22.0. Uji validitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2016: 122), "Instrumen yang reliabel belum tentu valid." Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas merupakan indeks menunjukkan sejauh alat yang mana pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas instrumen

diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Windows versi 22.0 dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach. Koefisien keandalan menunjukkan mutu seluruh proses pengumpulan data suatu penelitian. Suatu variabel dikatakan kurang baik jika memberikan nilai koefisien Alpha Cronbach < 0,6, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik (Priyatno, 2012: 187). Uji reliabilitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan metode yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis, data diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis berganda, dimana sebelum melakukan analisis berganda terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data dan uji asumsi klasik dengan menggunakan alat bantu program *Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Windows* versi 22.0.

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ditujukan untuk memperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Asumsi klasik yang harus terpenuhi dalam model regresi linier yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi. (Priyatno, 2012: 143). Uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujiaan regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

3.7.1.1 Uji Normalitas

Uji ini dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga untuk melihat

apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Normalitas suatu variabel umumnya dideteksi dengan grafik atau uji statistik. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan statistik Kolmogrov-Smirnov dengan nilai signifikansi di atas 0,05 terhadap masing-masing variabel. Selain itu, peneliti juga menggunakan uji normalitas residual dengan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *Normal P-P Plot of regression standardized residual*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal (Priyatno, 2012: 144).

3.7.1.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Priyatno (2012: 151), "Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antarvariabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1)". Metode uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Inflation Factor* (VIF) pada model regresi.

3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Priyatno (2012: 158), "Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas". Penelitian ini melihat pola titik-titik pada *scatterplots* regresi dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara *standardized predicted value* (ZPRED) dengan *studentized residual* (SRESID), ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Dasar pengambilan keputusan yaitu:

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari varibel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Selanjutnya untuk mengetahui diterima atau tidak hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dilakukan analisis data dengan menggunakan uji T dan uji F.

3.7.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Data yang telah dikumpulkan selanjutkan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁), Pengendalian Akuntansi (X₂) dan Sistem Pelaporan (X₃) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

```
AKIP = \alpha + \beta_1(Kejelasan\ Sasaran\ Anggaran) + \beta_2(Pengendalian\ Akuntansi) +\ \beta_3(Sistem\ Pelaporan) +\ e
```

Keterangan:

 α = Konstanta

 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi untuk $X_1, X_2, dan X_3$

e = Tingkat Kesalahan Pengganggu (*Error*)

3.7.2.2 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya regresi linier berganda. Jika R² yang diperoleh mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen. Uji regresi berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien determinan parsial (R²) untuk masing-masing variabel bebas. Menghitung R² digunakan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan efektif dari masing-masing variabel bebas.

Semakin besar nilai R² digunakan maka semakin besar variasi sumbangannya terhadap variabel terikat.

3.7.2.3 Uji Statistik T (Parsial)

Menurut Priyatno (2012), "Uji T digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen". Dalam hal ini untuk mengetahui apakah variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap AKIP. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Kriteria pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis alternatif diterima yaitu, variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis alternatif ditolak yaitu, variable independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Secara Parsial

X1 terhadap Y

 H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap AKIP.

 H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap AKIP.

X2 terhadap Y

 H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pengendalian Akuntansi terhadap AKIP.

 H_2 : Terdapat pengaruh yang signifikan Pengendalian Akuntansi terhadap AKIP.

X3 terhadap Y

 $H_0\,:\,$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Sistem Pelaporan terhadap AKIP.

H₃: Terdapat pengaruh yang signifikan Sistem Pelaporan terhadap AKIP.

3.7.2.4 Uji Statistik F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika *probability value* (p value) < 0,05, maka Ha diterima dan jika p value > 0,05, maka Ha ditolak. Uji F dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} .

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ (n-k-1), maka Ha diterima. Artinya, secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen .
- b. Jika F_{hitung} < F_{tabel} (n-k-1),maka Ha ditolak. Artinya, secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Secara Simultan

 H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP.

H₄: Terdapat pengaruh yang signifikan Kejelasan Sasaran Anggaran
 Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP.